



Jateng
gayeng

RENJA **(RENCANA KERJA)**

2022

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta keselarasan ruang lingkup perubahan dengan Prioritas Nasional yang telah diterbitkannya dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Proses penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD utamanya pada target indikator kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Perubahan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dinamika Peraturan Perundangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diperkuat dengan validasi pemutakiran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020) yang mempengaruhi substansi RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan renja perangkat daerah juga harus selaras dengan program kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP berpedoman pada RPJMN maupun kebijakan daerah yang tercantum dalam RKPD berpedoman pada RPJMD. Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar.

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- q. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 - u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79);
 - v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
 - w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Perubahan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disamping sebagai dokumen perencanaan program tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pelaksanaan program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan peningkatan kompetensi aparatur yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah juga melihat kondisi lingkungan strategis khususnya dampak Pandemi Covid 19 serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 dengan memperhatikan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan dengan kebijakan baru dan adanya pandemi Covid-19 dalam pencapaian target yang optimal serta perumusan kembali arah kebijakan, strategi dengan program pembangunan dalam Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing serta sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara perubahan renstra dengan perubahan renja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 mengacu ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD


Indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sasaran strategis tersebut antara lain :

- A. Tujuan : Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan
Sasaran :
- 1) Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN
 - 2) Meningkatnya kompetensi ASN
- B. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
Sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, terutama pada Misi ke-2 : 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperkuat sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Untuk mewujudkan visi tersebut pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat, Dengan 2 Program dan 11 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPSDMD dan Pencapaian BPSDMD Bappeda s/d Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Kepegawaian dan Diklat										
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	15	6	3	3	100,00	100		6	40,00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	21	12	9	75,00	100		21	35,00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100		24	40,00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5094	929	233	233	100,00	100		929	18,24
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	20	5	1	1	100,00	100		5	25,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	5	0				100		0	0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	3	0				100		0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	838	180	21	21	100,00	100		180	21,48
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	1310	262				100		262	20,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	100,00	100		100	100,00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	50	20	10	10	100,00	100		20	40,00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	105	42	21	21	100,00	100		42	40,00
	Pengembangan Kompetensi ASN										
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	2030	575	135	136	100,74	100	397	575	28,33
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	1829	551	210	210	100,00	100	364	551	30,13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	2941	1519	880	880	100,00	100	549	1519	51,65
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
	Kegiatan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan penjurusan jabatan fungsional	1200	207	30	30	100,00	100	230	207	17,25
	Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	2056	490	70	70	100,00	100	447	490	23,83
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	935	185	35	35	100,00	100	170	185	19,79
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	960	244	46	47	102,17	100	200	244	25,42
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	1360	402	42	42	100,00	100	280	402	29,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	600	164	60	60	100,00	100	120	164	27,33
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial	Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	480	160	80	80	100,00	100	80	160	33,33
	Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda	1090	1770	30	30	100,00	100	230	1770	162,39
		Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	11082	8735	1112	1110	99,82	100	80	8735	78,82
	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi										
		Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	80	81,13	77	81,13	105,36	100	78	81,13	101,41
	Perencanaan Pengembangan Kompetensi			0				0		0	
		Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	5	3	1	2	200,00	100	1	3	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	180	72	36	36	100,00	100	36	72	40,00
		Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	235	55	8	8	100,00	100	52	55	23,40
		Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	29	60	53	53	100,00	100	5	60	206,90
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3,5	3,5	3,5	3,5	100,00	100	3,5	3,5	100,00
	Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi			0				0		0	
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	300	89	29	29	100,00	100	57	89	29,67
		Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	5	2	1	1	100,00	100	1	2	40,00
		Jumlah pelatihan yang diakreditasi	5	3	2	2	100,00	100	1	3	60,00
		Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	10	4	1	2	200,00	100	1	4	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	910	215	33	33	100,00	100	88	215	23,63
	Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	80	74,16	80	74,16	92,70	100	80	74,16	92,70
	Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi										
		Jumlah Kualifikasi Aseesor kompetensi yang dimiliki	19	3	0	0	0,00	100	4	3	15,79
		Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	10	6	1	1	100,00	100	2	6	60,00
	Kegiatan Uji Kompetensi										
		Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	900	370	90	120	133,33	100	150	370	41,11

Ket : Sesuai dengan Kepmendagri 50 Tahun 2020 pada Urusan Penunjang/Eks BAU terdapat Perubahan Nama Kegiatan sehingga tidak dapat disandingkan dengan Capaian Renstra 2018-2023

Penyesuaian Nomenklatur Kegiatan Pada Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Kepegawaian dan Diklat										
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
	Administrasi Keuangan										
	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	15	6	12	12	100,00	100	3	6	40,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi										
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan										
	Administrasi Umum										
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah										
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan										
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor										
	Penyediaan Alat Tulis Kantor										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah										
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman										
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional										
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	100	12	24	40,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5094	929	233	233	100,00	100	88	929	18,24
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor										
	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	20	5	1	1	100,00	100	4	5	25,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	5	0	0	0	0,00	100	0		0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional										
	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	3	0	0	0	0,00	100	0		0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor										
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	838	180	21	21	100,00	100	35	180	21,48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d target akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal										
	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	1310	262	0	0	0,00	100	0	262	20,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya										

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menjalankan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat, sebagaimana diatur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Th. 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 20. Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 5 Th. 2019 ttg RPJMD Prov. Jateng Th. 2018-2023, yaitu : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Kepegawaian Dan Diklat.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 1 program utama yang menjadi bagian dari program-program prioritas pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan BPSDMD Prov. Jateng dalam upayanya bahwa meningkatkan kompetensi ASN Prov, Jateng merupakan tugas tanggung jawab bersama maka CorpU menjadi pilihan. Perumusan CorpU di Provinsi Jawa Tengah yang disepakati disebut sebagai Jateng Corporate University atau disingkat JATENG CU. Pengertian JATENG CU yaitu Model dan strategi pengembangan kompetensi secara terintegrasi selaras dengan kebutuhan organisasi. Pemahaman tersebut mengandung maksud bahwa untuk mengembangkan kompetensi inti semua ASN di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara gayeng dengan mengintegrasikan serta melibatkan kementerian, lembaga, instansi, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra utama pengembangan kompetensi.

Model dan strategi yang diwadahi dalam JATENG CU ini diharapkan dapat menjadi panduan step by step bagi semua instansi utamanya BPSDMD Prov. Jateng dalam mengidentifikasi kompetensi inti, merencanakan, melaksanakan pengembangan kompetensi dan mengevaluasinya. Dalam setiap proses tersebut pemanfaatan akan lebih di prioritaskan untuk membangun program pengembangan kompetensi yang berbasis teknologi informasi yang terkini.

Model dan strategi yang diwadahi dalam JATENG CU ini diharapkan dapat menjadi panduan step by step bagi semua instansi utamanya BPSDMD Prov. Jateng dalam mengidentifikasi kompetensi inti, merencanakan, melaksanakan pengembangan kompetensi dan mengevaluasinya. Dalam setiap proses tersebut pemanfaatan akan lebih di prioritaskan untuk membangun program pengembangan kompetensi yang berbasis teknologi informasi yang terkini.

Adapun Capaian masing-masing indikator program-program prioritas sebagaimana penjelasan berikut :

- Persentase kelulusan Program pengembangan kompetensi ASN, Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar CPNS mencapai 100%.
- Prosentase Kelulusan Sertifikasi Kompetensi 74,16%.
- Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti untuk Renja 2020 sebesar 81,13% dan Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan sebesar 3,5%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2022	2021	2022	2023	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia													
1	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti			76	77	78	79	80	76	81,1	78	79	80	
2	Indeks penjaminan Mutu pelaksanaan pelatihan			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
3	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Fungsional			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi yang lulus uji kompetensi			90	80	80	80	80	82,6	74,2	80	80	80	Perubahan Target dikarenakan Kelulusan berdasarkan kemampuan personal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan													
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dengan kedudukan dan fungsinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka urusan yang diampu menjadi prioritas adalah tentang pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Hal ini sejalan juga dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dimana dalam pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pedoman dalam pelaksanaan program kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan dengan kebijakan baru dan adanya pandemi Covid-19 dalam perumusan kembali arah kebijakan, strategi dengan program pembangunan dalam Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk menyamakan persepsi dan prioritas pengembangan kompetensi melalui Analisa Kebutuhan Pelatihan yang menjangkau sampai dengan Kab/Kota serta Sinkronisasi Program sebelum menetapkan jenis-jenis pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu dihadapi diantaranya :

- 1) Perencanaan pengembangan kompetensi PNS belum mengacu kebutuhan organisasi.
- 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi serta rendahnya rata - rata pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi.
- 3) Belum optimal penjaminan mutu pelatihan.
- 4) Menyiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi.
- 5) Perencanaan pengembangan kompetensi PNS sepenuhnya berdasarkan AKPK
- 6) Peralihan metode yang semula klasikal menjadi metode distance learning, karena memerlukan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran e-learning.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada berikut berikut ini :

Tabel 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				85.988.474	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				48.250.000
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang				1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang			
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	31 dokumen	532.768				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	31 dokumen	457.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang			
			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	6 dokumen	45.551.551				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	6 dokumen	35.911.325
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semarang				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semarang			
			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	259.545				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	200.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semarang				4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semarang			
			Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 dokumen	125.000				Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 dokumen	81.675
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang				5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang			
			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	952.463				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	99.520
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang				6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang			
			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	6.783.671				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	1.504.484
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang				7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang			
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	13.400.532				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	638.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang				8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			

			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	9.257.479			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	7.680.630	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang				9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			
			Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	9.125.465			Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	1.677.366	
II PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					33.330.383	II PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					12.800.000
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Semarang			26.014.919	1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Semarang		11.059.038	
			Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi	2 dokumen	560.740			Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi	2 dokumen		
			Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	3 dokumen	542.788			Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	3 dokumen		
			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	3 dokumen	113.409			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	3 dokumen		
			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	982 orang	4.152.256			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	785 orang		
			Jumlah Peserta Latsar CPNS	1200 orang	6.795.000			Jumlah Peserta Latsar CPNS	600 orang		
			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	860 orang	13.064.300			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	510 orang		
			Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi	1 dokumen	786.426			Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi	1 dokumen		
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Semarang			7.315.464	2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Semarang		1.740.962	
			Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	3 dokumen	721.789			Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	3 dokumen		
			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	1.555 orang	6.502.175			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	1.010 orang		
			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	3 dokumen	91.500			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	3 dokumen		
TOTAL					119.318.857	TOTAL					61.050.000

Dalam Tabel 2.3 diatas dapat digambarkan bahwa kebutuhan yang diajukan dalam Renja 2022 sebesar Rp. 119.318.857.000,-. sedangkan pagu indikatif BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2021 sebesar Rp. 75.549.923.000,- terdapat selisih Rp 43.768.934.000,- dikarenakan beberapa pelatihan masih dilaksanakan secara klasikal berdasarkan regulasi dari Instansi Pembina/Pusat. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara e-learning/blended learning membutuhkan penguatan dalam sarana dan prasarana penunjang pelatihan.

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Birokrasi harus memiliki visi yang besar, bersifat jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan permasalahan pembangunan dimana merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, beberapa identifikasi permasalahan / tantangan yang muncul di BPSDMD antara lain :

- Belum menyiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi.
- Perencanaan pengembangan kompetensi PNS belum sepenuhnya berdasarkan AKPK
- Kurangnya dukungan perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi

Guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 –2025 “ **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR** ” dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa strategi menjawab tantangan, antara lain :

- Optimalisasi hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai dasar perencanaan pengembangan kapasitas ASN
- Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran Modern
- Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam berbagai model / jenis pelatihan
- Pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang konsisten dan Berkesinambungan
- Peningkatan manajemen SDM pengembang kompetensi guna mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellence public services) serta mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing global
- Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana sesuai master plan dalam rangka menjamin mutu pelayanan publik serta mewujudkan lembaga pelatihan yang kompetitif
- Memaksimalkan anggaran yang ada dalam pengembangan sistem AKPK dan perlunya standart kompetensi sebagai dasar analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.

Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, yang didukung manusia

Indonesia yang memiliki karakteristik :

a. Berakhlak mulia ;

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai - nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

b. Berkesadaran Hukum ;

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

c. Cinta Tanah Air ;

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

d. Berwawasan Global ;

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keber - lanjutan RPJMN ke - 3, RPJMN ke - 4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pelayanan publik yang prima di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur birokrasi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi belum menunjukkan arah reformasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan demikian visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional & berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Proses perencanaan kegiatan yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) sebagai berikut :

a. Strength ;

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai problem solving dalam pembangunan memiliki reputasi yang baik dalam pengembangan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan ;
- Tersertifikasi ISO 9001:2015, bukti terhadap pemeliharaan standar mutu pelayanan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, dimana pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
 - Predikat Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik dalam kategori Lembaga Pemerintah Daerah penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS (4 kali sebagai terbaik pertama).
 - BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki fasilitas yang memadai sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi berbasis corporate university seperti yang diterapkan di era sekarang sebagai salah satu bentuk upaya dan inovasi pelatihan dalam kondisi pandemi Covid-19.

b. Weakness ;

Kurangnya pemanfaatan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai faktor rendahnya rata-rata pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi ; rendahnya rata-rata pegawai terkait dengan pengiriman peserta pelatihan oleh stakeholders yang seringkali mengirimkan peserta yang sama untuk beberapa pelatihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis perangkat daerah .

c. Opportunity ;

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mendukung melakukan pembenahan secara besar besaran menjadikan Jateng Corporate University dengan proses yang terintegrasi, metode pembelajaran yang menarik, output dan outcome jelas dalam menyiapkan ASN yang mempunyai integritas, mampu melayani masyarakat secara mudah, murah, dan cepat.
- Sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah lingkup kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Provinsi Jawa Tengah yang telah dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk seluruh jabatan fungsional.

d. Threat ;

- Penyelenggaran bangkom aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan rendahnya rata - rata pegawai mendapatkan bangkom, sehingga tidak adanya kesesuaian perencanaan pengembangan kompetensi dengan perencanaan penganggaran dari tiap stakeholders.
- Kurang optimalnya penjaminan mutu dalam pelatihan, karena seluruh program pelatihan teknis dan fungsional belum terakreditasi hingga dalam evaluasi pasca diklat belum dilakukan sampai kepada evaluasi dampak yang mendalam.
- Pergeseran dan shift paradigma dari training ke learning yang bisa menjadi kendala dalam pengembangan kompetensi dalam beberapa kurikulum dan modul yang tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Sesuai dengan Dokumen Perubahan Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan memperhatikan hasil dari analisis SWOT di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah **“ Mewujudkan ASN yang kompeten memiliki daya juang, inovatif dan profesional ”** dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut dengan persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
- Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.

Pada tahun 2021 target tujuan yang ingin dicapai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar yaitu **89,29 %**. Target sasaran tersebut dapat dicapai melalui target masing- masing tujuan :

- 1) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah **20 %**;
- 2) Persentase ASN yang tersertifikasi sebesar **36,79 %**.

Tujuan dan Sasaran

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Sat	2021
1	Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	89,29
		1. Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN ditingkatkan kompetensinya	%	20
		2. Meningkatnya penjaminan kompetensi	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,05
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,2
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai	80
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	72.6

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPSDMD, maka harus direncanakan program maupun kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Pada Tahun 2022 direncanakan 1 (satu) program prioritas dengan 2 (dua) kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional.

Program dan Kegiatan Prioritas tersebut didukung oleh Program dan Kegiatan Pendukung yang terdiri dari 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kesepakatan Forum Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Dokumen Renja Tahun 2022 sudah diakomodir dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang poin-poinnya adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengajar/Widyaiswara memegang peran penting dalam peningkatan Kualitas Kelulusan dan Kemampuan Peserta Pelatihan.
2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan untuk dapat diintegrasikan dengan Pendidikan Ideologi.
3. Dalam hal penuntasan kemiskinan, Angka Pengangguran menjadi titik pangkal di salah satu Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Tugas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui Pengembangan Kompetensi ASN di Jawa Tengah.
4. Karakter penting dalam pengembangan kompetensi ASN, untuk dapat diberikan materi pendidikan karakter dalam Pengembangan Kompetensi

5. Menyusun kebijakan teknis dengan kolaborasi dengan OPD di Jawa Tengah terkait dengan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
6. BPSDMD agar memperhatikan dan bertanggungjawab dalam mengawal Kebijakan Jawa Tengah Corporate University (Jateng Corpu).

Program dan kegiatan prioritas maupun pendukung secara rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut :

5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota												630.862		630.862	Semarang	
										Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	211 orang		630.862	211 orang	630.862		
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar												187.358		187.358	Semarang	
										Jumlah pelatihan yang diakreditasi	1 jenis		55.439	2 jenis	55.439		
										Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 orang		47.500	4 orang	47.500		
										Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 dokumen		84.419	1 dokumen	84.419		
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional												42.736		42.736	Semarang	
										Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun / disempurnakan	5 dokumen		36.000	5 dokumen	36.000		
										Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun / Disempurnakan	1 dokumen		6.736	1 dokumen	6.736		
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												9.900.000		15.350.000	Semarang	
										Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	80 orang		464.698	80 orang	464.698		
										Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	170 orang		516.350	170 orang	516.350		
										Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	535 orang		418.952	535 orang	418.952		
										Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	600 orang		2.038.500	1500 orang	5.038.500		
										Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah	190 orang		475.060	350 orang	575.060		
										Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	80 orang		1.431.600	160 orang	2.431.600		
										Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	80 orang		1.500.240	160 orang	2.650.240		
										Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	120 orang		2.964.840	120 orang	2.964.840		
										Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	40 orang		89.760	160 orang	289.760		
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan												166.944		166.944	Semarang	
										Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	32 dokumen		35.539	32 dokumen	35.539		
										Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	122 angkatan		131.405	122 angkatan	131.405		

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												48.250.000		48.250.000	Semarang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
														100			
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												457.000		457.000	Semarang	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												171.763		171.763	Semarang	
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												285.237		285.237	Semarang	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												35.911.325		35.911.325	Semarang	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												30.393.000		30.393.000	Semarang	
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												5.223.000		5.223.000	Semarang	
X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												42.471		42.471		
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												43.124		43.124	Semarang	
X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												65.340		65.340	Semarang	
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												144.390		144.390	Semarang	
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												200.000		200.000	Semarang	
X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												200.000		200.000	Semarang	

X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													120.690			120.690	Semarang	
									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan			120.690	12 bulan			120.690		
X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													9.721			9.721	Semarang	
									Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	12 bulan			9.721	12 bulan			9.721		
X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													315.635			315.635	Semarang	
									Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 dokumen			315.635	4 dokumen			315.635		
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													638.000			638.000	Semarang	
								Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen				1 dokumen						
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel													-			-	Semarang	
									Jumlah unit pengadaan meubelair	0 unit			-	0 unit			-		
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													377.000			377.000	Semarang	
									Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	84 unit			377.000	84 unit			377.000		
X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													-			-	Semarang	
									Jumlah unit pengadaan aset tetap	0 paket			-	0 paket			-		
X.XX.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud													-			-	Semarang	
									Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	0 unit			-	0 unit			-		
X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-			-	Semarang	
									Jumlah unit pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	0 unit			-	0 unit			-		
X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													261.000			261.000	Semarang	
									Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	6 unit			261.000	6 unit			261.000		
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-			-	Semarang	
									Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0 paket			-	0 paket			-		
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													7.680.630			7.680.630	Semarang	
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen				1 dokumen						
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													4.750			4.750	Semarang	
									Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	12 bulan			4.750	12 bulan			4.750		
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													1.849.000			1.849.000	Semarang	
									Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	12 bulan			1.849.000	12 bulan			1.849.000		
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													5.826.880			5.826.880	Semarang	
									Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			5.826.880	12 bulan			5.826.880		

X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.677.366		1.677.366	Semarang	
								Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen				1 dokumen			
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											217.965		217.965	Semarang	
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	12 bulan			217.965	12 bulan	217.965		
X.XX.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											25.000		25.000	Semarang	
								Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	12 bulan			25.000	12 bulan	25.000		
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											1.000.000		1.000.000	Semarang	
								Jumlah unit gedung yang direhab	53 unit			1.000.000	53 unit	1.000.000		
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											434.401		434.401	Semarang	
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	12 bulan			434.401	12 bulan	434.401		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Kondisi Lingkungan Strategis (Lingstra) dampak dari Pandemi Covid 19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian arah kebijakan, startegi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang optimal sesuai dengan kebijakan / regulasi, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati (perencanaan penganggaran menyesuaikan dengan perubahan mekanisme sistem pembelajaran).

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk melakukan perubahan pola penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pola classical menjadi pola distance learning atau jarak jauh yang juga akan mempengaruhi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang digunakan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah antara lain memastikan terlaksananya Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi yang berperan sebagai penguatan Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang mengikuti pelatihan. Serta mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, menjadikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Problem Solving bagi permasalahan pembangunan di Jawa Tengah dengan melibatkan beberapa stakeholder / pentahelik sebagai Community of Practice dan sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN, serta mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang Kompeten dan Profesional dalam memberikan pelayanan Excellent kepada masyarakat dengan mewujudkan Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM Organisasi, melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi melalui Jateng Corporate University menuju Jateng Pinter Bareng, penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan Techno Training Center serta memberikan Fasilitasi kepada Stakeholders terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680614 199001 1 001